KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Marak Kasus Perundungan: Anak Didik Butuh Pendidikan Akhlak
Tanggal : Minggu, 01 Oktober 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Marak Kasus Perundungan

Anak Didik Butuh Pendidikan Akhlak

KETUA DPR Puan Maharani mendorong Pemerintah untuk mencari solusi dari maraknya kasus perundungan atau *bullying* di Indonesia, terutama perundungan anak. Dalam kasus bullying berujung penganiayaan, hal tersebut tidak dapat ditolerir.

"Banyaknya kasus bullying membuat Indonesia saat ini berada dalam situasi darurat perundungan. Negara tidak boleh membiarkan kasus bullying terus mengalir tanpa ada solusi yang komprehensif, khususnya untuk perundungan yang melibatkan anak sebagai korban dan pelaku," kata Puan, kemarin.

Seperti diketahui, kasus perundungan anak saat ini banyak yang sedang menjadi sorotan. Setelah adanya kasus anak sekolah yang matanya ditusuk oleh tusukan cilok/bakso hingga mengalami kebutaan, terbaru muncul kasus bullying siswa SMP hingga korban mengalami patah tulang rusuk.

Bahkan dari video yang viral di media sosial, pelaku bullying melakukan kekerasan fisik dengan memukul, menendang hingga membanting korban. Korban akhirnya dirawat di rumah sakit karena mengalami luka di bagian dada hingga mengalami sesak napas.

Oleh karena maraknya kasus tersebut, Puan merasa sangat prihatin. "Kasus siswa SD yang sebelah matanya mengalami kebutaan akibat kekerasan kakak kelasnya belum ada kejelasan sampai sekarang, kini muncul kasus penganiayaan baru siswa sekolah," ucapnya.

Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini menekankan pentingnya sekolah mengedepankan pendidikan karakter untuk membangun mental yang positif bagi para siswa. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) kudu membuat kurikulum untuk membangun karakter siswa yang positif.

"Penting sekali agar pendidikan budi pekerti kembali masuk dalam kurikulum di sekolah, karena menjadi modal penanaman akhlak untuk anak. Pendidikan bukan hanya tentang



Puan Maharani

prestasi akademik, tetapi juga tentang membentuk karakter dan mental yang kuat pada para siswa," jelasnya.

Ditambahkannya, pendidikan kewarganegaraan siswa di sekolah perlu dilengkapi dengan adanya pendidikan moral dan budi pekerti. Ia menyinggung soal banyaknya kasus di sekolah di mana pembelajaran saat ini lebih banyak berfokus pada unsur akademik semata.

Padahal penanaman akhlak melalui pendidikan budi pekerti sangat diperlukan anak-anak kita bisa menjadi generasi penerus bangsa yang bermartabat, berbudaya, berakhlak serta berkarakter kuat. "Sekolah harus menjadi wahana untuk mengembangkan individu yang bertanggung jawab, berempati, dan berperilaku baik," tambahnya.

Puan meminta Pemerintah memetakan faktor-faktor yang menyebabkan maraknya kasus bullying di Tanah Air. Menurutnya, praktik bullying bisa disebabkan dari banyak faktor. Mulai dari lingkungan sekitar, maupun dari internal keluarga.

Puan juga mendorong Pemerintah menyelesaikan fenomena maraknya kasus bullying secara lebih khusus, terutama yang melibatkan anak. Apalagi, dampak bullying bisa membuat anak depresi hingga meninggal dunia. Perlu ada penanganan khusus dari kasus bullying anak yang melibatkan berbagai instansi.

"Karena masalah bullying banyak sekali irisannya. Bagaimana diperlukan dukungan dari Pemerintah untuk menciptakan ketahanan keluarga untuk memastikan anak dapat bertumbuh dengan fisik dan mental yang baik," sebut Puan.

Dari data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), kasus bullying masih menjadi teror bagi anak-anak di lingkungan sekolah. Dari data tersebut diketahui, tercatat terjadi 226 kasus bullying pada tahun 2022. Lalu di tahun 2021 ada 53 kasus, dan tahun 2020 sebanyak 119 kasus.

Sementara itu untuk jenis bullying yang sering dialami korban ialah bullying fisik (55,5 persen), bullying verbal (29,3 persen), dan bullying psikologis (15,2 persen). Untuk tingkat jenjang pendidikan, siswa SD menjadi korban bullying terbanyak (26 persen), diikuti siswa SMP (25 persen), dan siswa SMA (18,75 persen). ■ KAL